

**IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MEMBANGUN DAN MENUMBUHKAN
KARAKTER ANTI KORUPSI MENURUT KITAB MIKHA PADA PESERTA DIDIK
DI SMK S HKBP PANGURURAN**

**Enjel Wiranata Kristyana Sinaga, Dita Sinaga, Febryanti Sagala
Andar Gunawan Pasaribu**

Institut Agama Kristen Negeri Tarutung
enjels158@gmail.com nataniadita@gmail.com, febryantisagala28@gmail.com,
andargunawanpasaribu@gmail.com

Abstrak

Kitab Mikha merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berisi pesan kenabian Nabi Mikha, seorang nabi dari Moresyet yang hidup pada masa pemerintahan Yotam, Ahas, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Kitab ini terdiri dari tujuh pasal yang mengandung peringatan, penghakiman, dan janji pemulihan bagi bangsa Israel dan Yehuda. Nabi Mikha mengecam ketidakadilan sosial, penyembahan berhala, serta kebobrokan moral para pemimpin bangsa. Dia menekankan pentingnya hidup dengan keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Selain nubuat penghukuman, Kitab Mikha juga menawarkan pengharapan akan kedatangan seorang pemimpin yang adil dan damai dari Betlehem, yang kemudian dihubungkan dengan nubuat kedatangan Mesias. Dalam pesan profetisnya, Mikha menunjukkan keseimbangan antara keadilan ilahi dan belas kasih Tuhan yang selalu membuka jalan pemulihan bagi umat yang bertobat. Kitab ini relevan sepanjang masa sebagai pengingat tentang keadilan sosial dan hubungan yang benar dengan Tuhan.

Kata Kunci : Mikha, nabi, keadilan sosial, pemulihan, nubuat, Mesias, penghakiman, kasih setia.

Abstract

The Book of Micah is one of the books in the Old Testament which contains the prophetic message of the Prophet Micah, a prophet from Moresheth who lived during the reign of Jotham, Ahaz, and Hezekiah, the kings of Judah. This book consists of seven chapters containing warnings, judgment, and promises of restoration for the people of Israel and Judah. The prophet Micah condemned social injustice, idolatry, and the moral depravity of the nation's leaders. He stressed the importance of living with justice, steadfast love, and humility before God. Apart from the prophecy of judgment, the Book of Micah also offers hope for the arrival of a just and peaceful leader from Bethlehem, which is then connected to the prophecy of the coming of the Messiah. In his prophetic message, Micah shows the balance between divine justice and God's mercy which always opens the way to recovery for repentant people. This book is relevant throughout time as a reminder of social justice and a right relationship with God. Keywords : Micah, prophet, social justice, restoration, prophecy, Messiah, judgment, steadfast love

PENDAHULUAN

Kitab Mikha adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang tergolong dalam kelompok kitab nabi-nabi kecil. Nama Mikha berasal dari bahasa Ibrani *Mikayahu*, yang artinya “Siapakah yang seperti Tuhan?” Mikha hidup dan bernubuat pada waktu pemerintahan Raja Yotam, Ahas, serta Hizkia di Kerajaan Yehuda, sekitar abad ke-8 SM. Masa itu ditandai dengan berbagai tantangan sosial, politik, serta spiritual, baik di Kerajaan Israel maupun Yehuda.

Sebagai seorang nabi, Mikha menyampaikan kritik tajam terhadap ketidakadilan sosial dan penyembahan berhala yang banyak terjadi di tengah umat Israel. Ia menekankan perilaku para pemimpin bangsa yang menindas rakyat miskin dan menjadikan hukum hanya sebagai alat kekuasaan. Mikha tidak hanya berbicara mengenai hukuman yang akan datang akibat dosa-dosa bangsa, tetapi juga memberikan harapan akan pemulihan yang akan dilakukan Tuhan di masa yang akan datang.

Pesan inti kitab ini adalah seruan kepada umat untuk hidup dalam kebenaran, kasih setia, dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Salah satu ayat yang paling terkenal dari kitab ini adalah Mikha 6:8 yang mengatakan, “Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu?”

Melalui nubuat dan pesan profetiknya, kitab Mikha tetap relevan bagi umat beriman hingga saat ini. Seruannya untuk keadilan sosial, kesetiaan kepada Tuhan, serta pengharapan akan keselamatan mengingatkan kita tentang pentingnya menjalani hidup yang mencerminkan nilai-nilai ilahi di setiap aspek kehidupan.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Penulis mengumpulkan informasi dan teori dari berbagai sumber sastra yang berkaitan dengan topik yang relevan dan terdengar akademis, seperti buku, jurnal, komentar dan sumber internet yang dapat dipercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan Menanamkan Dan Menumbuhkan Karakter

Pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran atas kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun kebangsaan. Pengembangan karakter bangsa dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang. Akan tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan sosial, budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah Pancasila, jadi pendidikan budaya dan karakter adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan karakter atau pendidikan watak sejak awal munculnya pendidikan oleh para ahli dianggap sebagai suatu hal yang niscaya.¹

John Sewey, misalnya, pada tahun 1916 yang mengatakan bahwa sudah merupakan hal yang lumrah dalam teori pendidikan bahwa pembentukan watak merupakan tujuan umum pengajaran dan pendidikan budi pekerti di sekolah.² Kemudian pada tahun 1918 di Amerika Serikat (AS), Komisi Pembaharuan Pendidikan Menengah yang ditunjuk oleh Perhimpunan Pendidikan Nasional melontarkan sebuah pernyataan bersejarah yaitu mengenai tujuan pendidikan umum. Lontaran itu dalam sejarah kemudian dikenal sebagai “Tujuh Prinsip Utama Pendidikan”, antara lain:

1. Kesehatan
2. Penguasaan proses-proses fundamental
3. Menjadi anggota keluarga yang berguna
4. Pekerjaan
5. Kewarganegaraan
6. Penggunaan waktu luang secara bermanfaat
7. Watak susila

Pendidikan ke arah terbentuknya karakter bangsa para siswa merupakan tanggungjawab semua guru. Oleh karena itu, pembinaannya pun harus oleh guru. Dengan demikian, kurang

¹ Nopan Omeri, Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan, nitro PDF Profesional, 465-466.

² John Sewey, Democracy and Education, 1916.

tepat jika dikatakan bahwa mendidik para siswa agar memiliki karakter bangsa hanya ditimpahkan pada guru mata pelajaran tertentu, misalnya guru PKN atau Guru PAI. Walaupun dapat dipahami bahwa yang dominan untuk mengajarkan pendidikan karakter bangsa adalah para guru yang relevan dengan pendidikan karakter bangsa. Tanpa terkecuali, semua guru harus menjadikan dirinya sebagai sosok teladan yang berwibawa bagi para siswanya. Sebab tidak akan memiliki makna apapun bila seorang guru PKn mengajarkan menyelesaikan suatu masalah yang bertentangan dengan cara demokrasi, sementara guru lain dengan cara otoriter. Atau seorang guru pendidikan agama dalam menjawab pertanyaan para siswanya dengan cara yang nalar sementara guru lain hanya mengatakan asal-asalan dalam menjawab.

Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia yang tak pernah ditinggalkan. Sebagai sebuah proses, ada dua hal asumsi yang berbeda mengenai Pendidikan dalam kehidupan manusia. Pertama, bisa dianggap sebagai sebuah proses yang terjadi secara tidak disengaja atau berjalan secara alamiah. Pendidikan bukanlah proses yang diorganisasi secara teratur, terencana, dan menggunakan metode-metode yang dipelajari serta berdasarkan aturan-aturan yang telah disepakati mekanisme penyelenggaraannya oleh suatu komunitas masyarakat (Negara), melainkan lebih merupakan bagian dari kehidupan yang memang telah berjalan sejak manusia itu ada. Pengertian ini menunjuk bahwa pada dasarnya manusia secara alamiah merupakan makhluk yang belajar dari peristiwa alam dan gejala-gejala kehidupan yang ada untuk mengembangkan kehidupannya. Kedua, pendidikan dianggap sebagai proses yang terjadi secara sengaja, disengaja, dan diorganisasi berdasarkan aturan yang berlaku, terutama perundang-undangan yang dibuat atas dasar kesepakatan masyarakat. Pendidikan sebagai sebuah kegiatan dan proses aktivitas yang disengaja ini merupakan gejala masyarakat ketika sudah mulai disadari pentingnya upaya untuk membentuk, mengarahkan, dan mengatur manusia sebagaimana dicita-citakan masyarakat terutama cita-cita orang yang mendapatkan kekuasaan. Cara mengatur manusia dalam pendidikan ini tentunya berkaitan dengan bagaimana masyarakat akan diatur. Artinya, tujuan dan pengorganisasian Pendidikan mengikuti arah perkembangan sosio-ekonomi yang berjalan. Jadi, ada aspek material yang menjelaskan bagaimana arah Pendidikan didesain berdasarkan siapa yang paling berkuasa dalam masyarakat tersebut.

Karakter merupakan perpaduan antara moral, etika, dan akhlak. Moral lebih menitik beratkan pada kualitas perbuatan, tindakan atau perilaku manusia atau apakah perbuatan itu bisa dikatakan baik atau buruk, atau benar atau salah. Sebaliknya, etika memberikan penilaian

tentang baik dan buruk, berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tertentu, sedangkan akhlak tatanannya lebih menekankan bahwa pada hakikatnya dalam diri manusia itu telah tertanam keyakinan di mana keduanya (baik dan buruk) itu ada. Karenanya, pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan nilai, Pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, Pendidikan watak, yang tujuannya mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik-buruk, memelihara apa yang baik itu, dan mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati.

B. Anti Korupsi

Dalam sejarah kehidupan manusia, korupsi bukan hal baru. Sejak manusia hidup bermasyarakat, sudah tumbuh perilaku koruptif atau menyimpang, yang tidak sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Manusia dan kelompok sosial yang hidup dalam persaingan memperebutkan tanah dan sumber daya alam untuk keperluan hidup, telah mendorongnya bertindak menyimpang, memanipulasi, menipu, dan melakukan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Perilaku koruptif manusia yang dimaksudkan untuk menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya memiliki variasi yang beranekaragam, sehingga pola-pola tindakan korupsi juga banyak variasinya. Itulah sebabnya, dipahami bahwa korupsi bukan konsep sederhana.³

Korupsi merupakan konsep yang kompleks, sekompleks persoalan yang dihadapi oleh suatu masyarakat atau pemerintahan. Demikian pula, mendefinisikan korupsi bukan pekerjaan yang mudah. Sebagaimana dinyatakan oleh Phil Williams, meningkatnya ragam korupsi akibat kecanggihan para pelaku yang menyebabkan pendefinisian korupsi terus dikaji ulang agar mendapat pemahaman yang sistematis (Sitepu, 2004: 1).⁴

Perlu dikemukakan akar kata korupsi dan pengertian secara etimologis, sebelum diketengahkan definisi korupsi dari para pemerhati masalah korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yakni *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda inilah kata *corruptie* diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu korupsi. Dalam bahasa Muangthai, korupsi

³ Maheka, Arya. T.th. *Mengenal dan Memberantas Korupsi*. Jakarta: KPK RI

⁴ Sitepu, *Dinamika Korupsi dan Strategi Pemberantasannya*, 2004, 1.

dinamakan *gin moug*, artinya makan bangsa; dalam bahasa China, *tanwu*, artinya keserakahan bernoda; dan dalam bahasa Jepang, *oshuku*, yang berarti kerja kotor (KPK, 2007: 2).⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berasal dari kata *korup* artinya: buruk, rusak, busuk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan pribadi (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 596-596). Dalam kamus tersebut, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Pusat Bahasa Depdiknas, 2002: 597). Dari istilah-istilah tersebut, korupsi dipahami sebagai perbuatan busuk, rusak, kotor, menggunakan uang atau barang milik lain (perusahaan atau negara) secara menyimpang yang menguntungkan diri sendiri. Korupsi melibatkan penyalahgunaan kepercayaan, yang umumnya melibatkan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁶

Johnson (2005: 12) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan peran, jabatan publik atau sumber untuk keuntungan pribadi.⁷

Dalam definisi tersebut, terdapat empat komponen yang menyebabkan suatu perbuatan dikategorikan korupsi, yaitu penyalahgunaan (*abuse*), *public* (*public*), pribadi (*private*), dan keuntungan (*benefit*). Dalam pandangan Johnson 2005: 16), dalam negara yang melaksanakan liberalisasi dan privatisasi dalam kegiatan ekonomi, akan muncul kecenderungan terjadinya pertukaran antara kesejahteraan (*wealth*) dan kekuasaan (*power*). Inilah yang oleh Johnson disebut dengan *corruption syndromes*.⁸

Perbuatan korupsi berkaitan erat dengan kecurangan atau penipuan yang dilakukan. Berbuat curang atau menipu, berarti orang tersebut tidak jujur. Kejujuran memang merupakan suatu sikap dan perilaku yang langka di negeri ini. Dalam kenyataannya, tidak setiap orang jujur dalam kehidupan sehari-harinya

Ada 4 (empat) katagori kejujuran. Pertama, sejumlah orang jujur untuk setiap saat. Kedua, sejumlah orang tidak jujur untuk setiap saat. Ketiga, sebagian besar orang jujur untuk setiap saat. Keempat, sejumlah orang jujur hampir setiap saat. Dari empat tipe perilaku yang berkaitan dengan kejujuran tersebut, perilaku keempat yang paling baik dan relevan untuk menumbuhkan perilaku antikorupsi. Dalam kaitan dengan korupsi, kecurangan bisa mendorong perbuatan korupsi. Hal ini dapat terjadi karena adanya 3 (tiga) tiang penyangga korupsi, yaitu tekanan

⁵ KPK, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, 2007, 2.

⁶ Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, 596-597.

⁷ Johnson, Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan Pribadi, 2005, 12

⁸ Johnson, Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan Pribadi, 2005, 16.

(pressure), kesempatan (opportunity), dan rasionalisasi (rationalize). Tekanan seperti mengikuti gaya hidup modern, kerugian materi atau uang, terbelit hutang, akan menyebabkan seseorang berbuat curang atau korupsi. Orang yang memiliki kedudukan, jabatan, pangkat, dan pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan untuk berbuat korupsi. Kesempatan itu dimiliki karena pihak koruptor memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kondisi departemen, kantor, atau lingkungannya. Selain itu, karena mereka memiliki otoritas untuk mengendalikan kegiatan atau pekerjaan.

Demikian pula, mereka mengetahui kelemahan di lingkungan departemen, kantor, dan pekerjaannya, sehingga dapat dimanipulasi yang menyebabkan pihak lain tidak tahu bahwa mereka telah melakukan korupsi. Perbuatan curang atau korupsi dikemas sedemikian rupa, sehingga apa yang dilakukan seolah bukan tindakan korupsi. Inilah yang disebut dengan rasionalisasi perilaku korupsi. Ditambah oleh tidak adanya moral atau etika yang baik dari pelaku korupsi, menyebabkan perbuatan curang tersebut mempermudah orang melakukan korupsi.

Antikorupsi merupakan kebijakan untuk mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi (Maheka, t.th: 31). Pencegahan yang dimaksud adalah bagaimana meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan korupsi dan bagaimana menyelamatkan uang dan aset negara. Menurut Maheka (t.th: 31), peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusianya.⁹ Dalam hal perbaikan sistem, langkah-langkah antikorupsi mencakupi:

1. Memperbaiki peraturan perundangan yang berlaku untuk mengantisipasi perkembangan korupsi dan menutup celah hukum atau pasal-pasal karet yang sering digunakan koruptor melepaskan diri dari jerat hukum;
2. Memperbaiki cara kerja pemerintahan (birokrasi) menjadi sederhana (simpler) dan efisien;
3. Memisahkan secara tegas kepemilikan negara dan kepemilikan pribadi serta memberikan aturan yang jelas tentang penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan umum dan penggunaannya untuk kepentingan pribadi;
4. Menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga dengan pemberian sanksi secara tegas;
5. Penerapan prinsip-prinsip good governance;

⁹ Maheka, Arya, T.th, Mengenal dan Memberantas Korupsi (Jakarta: KPK RI).

6. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan memperkecil terjadinya human error.

Berkaitan dengan perbaikan manusia, langkah-langkah antikorupsi meliputi :

1. Memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, yaitu dengan mengoptimalkan peran agama dalam memberantas korupsi. Artinya bahwa pemuka agama berusaha mempererat ikatan emosional antara agama dengan umatnya, menyatakan dengan tegas bahwa korupsi merupakan perbuatan tercela, mengajak masyarakat untuk menjauhkan diri dari segala bentuk perilaku korupsi, dan menumbuhkan keberanian masyarakat untuk melawan korupsi
2. Memperbaiki moral bangsa, yakni mengalihkan loyalitas keluarga, klan, suku, dan etnik ke loyalitas bangsa;
3. Meningkatkan kesadaran hukum individu dan masyarakat melalui sosialisasi dan pendidikan antikorupsi;
4. Mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan kesejahteraan;
5. Memilih pemimpin (semua level) yang bersih, jujur, antikorupsi, peduli, cepat tanggap (responsif) dan dapat menjadi teladan bagi yang dipimpin.

Upaya-upaya antikorupsi di berbagai negara seringkali mengalami kegagalan. Karena itulah, Pope (2007: xxxi) menyarankan hal-hal berikut agar upaya antikorupsi dapat mencapai keberhasilan.¹⁰

1. Kemauan yang teguh di pihak pemimpin politik untuk memberantas korupsi dimanapun terjadi dan untuk diperiksa;
2. Menekankan pencegahan korupsi di masa datang dan perbaikan sistem;
3. Adaptasi undang-undang antikorupsi yang menyeluruh dan ditegakkan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai integritas;
4. Identifikasi kegiatan-kegiatan pemerintahan yang paling mudah menimbulkan rangsangan untuk korupsi dan meninjau kembali undang-undang terkait dan prosedur administrasi;
5. Program untuk memastikan bahwa gaji pegawai negeri dan pemimpin politik mencerminkan tanggung jawab jabatan masing-masing dan tidak jauh berbeda dari gaji di sektor swasta;

¹⁰ Pope, Strategi Efektif dalam Pemberantasan Korupsi, 2007, 31.

6. Penelitian mengenai upaya perbaikan hukum dan administrasi yang memastikan upaya hukum dan administrasi bersangkutan cukup mampu berfungsi sebagai penangkal korupsi;
7. Menciptakan kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil;
8. Menjadikan korupsi sebagai perbuatan beresiko tinggi dan berlabar rendah;
9. Mengembangkan gaya manajemen yang selalu berubah yang memperkecil resiko bagi orang-orang yang terlibat dalam korupsi “kelas teri”, dan yang mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh politik, namun dilihat oleh masyarakat luas sebagai program yang adil dan masuk akal bagi situasi yang ada.

C. Korupsi Dalam Kitab Mikha

Korupsi merupakan masalah etis yang klasik dan bahkan sudah ada sejak manusia jatuh dalam dosa. Catatan sejarah Mesir Kuno menyatakan bahwa korupsi sudah merajalela sejak awal mula berdirinya peradaban Mesir Kuno. Bahkan raja Mesir dan Babilonia sekali pun tidak mampu mengendalikan praktik korupsi yang terjadi di kerajaan mereka. Korupsi, intrik dan politik selalu sejalan dengan kudeta dan penggulingan kekuasaan. Sejak masa kekuasaan Ramses III kerajaan Mesir Kuno tidak pernah bebas dari politik kotor yang melibatkan para koruptor (Myśliwiec, 2000, p. 17). Dalam sejarah kerajaan Israel, gambaran yang sama dapat kita temukan tentang kombinasi antara korupsi dan politik kotor.¹¹ Para penguasa saling menjatuhkan dan membunuh untuk memperkokoh kekuasaan mereka.

Tingginya dugaan kasus korupsi yang melibatkan berbagai oknum aparaturnegara menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa terjadi demikian, seharusnya aparaturnegara yang berfungsi mencegah dan memberantas tindakan korupsi malah ikut terlibat dalam perbuatan korupsi. Kita dapat mencermati meningkatnya kekerasan di hampir segala bidang kehidupan. Persoalan yang tidak dapat diselesaikan dengan bijaksana hampir semua bermuara pada penindasan dan kekerasan baik secara fisik (misalnya: pembunuhan, penganiayaan, perampokan) maupun non fisik (misalnya: berupa tekanan-tekanan, stigma, perlakuan tidak adil).

¹¹ Mislywiec, Mesir Kuno dan Intrik Kekuasaan: Politik, Korupsi dan Kejatuhan, 200, 17.

Secara tradisional, Kitab Mikha dipahami sebagai kitab yang ditulis oleh seorang yang bernama Mikha dan berasal dari Moresyet-Gat¹², yang letaknya di barat daya Yerusalem⁴ (bnd. 1:14) dan dia hidup kira-kira pada tahun 725 SM⁵ dan nabi Mikha sedikit lebih muda daripada Yesaya yang sezaman dengannya.¹³ Yerusalem merupakan salah satu kota di Israel Utara dengan gambaran geografis tanah yang subur dan lebih banyak penduduknya daripada di Selatan atau Israel. Pemberitaan nabi Mikha juga sangat kental dengan pengaruh Amos yang memprotes “ketidakadilan sosial” di dalam masyarakat. Berdasarkan rentang waktu kepenulisan Kitab Mikha dimulai dari pemerintahan raja Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Namun, puncak pemberitaannya tepatnya pada zaman raja Hizkia dan tidak menutup kemungkinan dilanjutkan oleh para murid atau pengikut Mikha.

Sama seperti kitab-kitab kenabian yang lain, kitab Mikha adalah kumpulan unit literary yang singkat. Kumpulan unit-unit sastra ini yang terdiri dari struktur, gaya, dan tema masing-masing, ternyata sudah mempertahankan akan kekhasannya. Pandangan tradisional mengatakan bahwa Mikha 1-3 mengandung materi autentik dari sang Nabi Mikha. Pandangan ini masih diperdebatkan oleh para ahli Perjanjian Lama karena gaya bahasa yang digunakan seperti pada pasal 2:6-11 dan pasal 3:5-8 yang mencantumkan kata ganti orang “aku” tampaknya sudah ada tambahan dari redaktur kemudian.

Juga dalam Mikha 4-5 pada bagian awal menjelaskan bahwa penghakiman, menggunakan kata “sekarang” pada pasal 4:9, 11, 14 yang mencerminkan Persia awal, sementara itu dalam Mikha 6-7 peringatan-peringatan dan tuduhan-tuduhan (bnd. 6:1-7:7) muncul kembali dan tampaknya dikombinasikan dengan keselamatan (bnd. 7:8-20) yang tidak berbeda dalam Yesaya 56-66.

Mikha pasal 4-5 merupakan tulisan dengan pesan teologi mengenai penyelamatan bersyarat¹³ dan berbeda dengan berita kecaman di pasal 3:1-12. Menurut Ewald dalam Smith berpendapat bahwa Mikha pasal 6-7 bukan karya Nabi Mikha namun karya nabi lain yang hidup pada masa-masa kelam pemerintahan Manasye.

¹² 3 Moreshet adalah sebuah kota kecil yang jaraknya 40 km atau 25 mil di sebelah barat Yerusalem, tidak jauh dari Gat yang merupakan perbatasan orang Filistin. Sekitar 11 km atau 7 mil dari Moresyet-Gat ada lima kota yang berbenteng yang merupakan pusat administrasi yang sering dikunjungi oleh pejabat militer dan pengadilan dari Yerusalem. Juan I. Alfaro, *Justice and Loyalty: Internasional Theological Commentary Micah* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1989), 3. Bdk. W. Edward Glenny, *Micah, A Commentary based on Micah in Codex Vaticanus Septuagint Commentary Series* (Leiden, Boston: Brill, 2015), 52.

¹³ Jan Christian Gertz, 590

Sedangkan pasal 1-5 merupakan tulisan Nabi Mikha yang tidak perlu ditambahkan apa-apa, tetapi ada perubahan total dalam gaya dan sejarah pada pasal 6-7. Selanjutnya Welhausen menyetujui pendapat Ewald bahwa Mikha pasal 6:1-7:6 tulisan yang berasal dari zaman Manasye, namun Welhausen menyimpulkan bahwa 7:7-20 merupakan tambahan redaktur pada masa pembuangan.¹⁴ Kepenulisan Kitab Mikha berasal dari periode yang berbeda-beda. Terdapat beberapa bagian teks yang tidak menunjukkan jalinan tema yang sistematis. Sebagai contoh pada Mikha 2:12-13 janji untuk keluar dari tanah pengasingan begitu bertentangan dengan ancaman untuk masuk ke pengasingan pada konteks sebelumnya dituliskan pada pasal 1:16, 2:4, 10. Sementara teks-teks tersebut menunjukkan satu kesatuan sampai pada pasal 3:1.

Komposisi pesan teologi Kitab Mikha berdasarkan situasi kehidupan sosialnyayaitu: Komposisi bagian pertama adalah Mikha 1:2-2-11 yang menuliskan mengenai bencana penghakiman terhadap Israel dan Yehuda, kritik sosial dan pasal 2:12-13 tentang keselamatan bagi sisa Israel. Berdasarkan komposisi bagian pertama ini maka situasi kehidupan sosial yang terjadi di Yehuda pada zaman Mikha tidak seperti yang terjadi di Israel.¹⁵ Hanya orang-orang yang memegang jabatan seperti pemerintah agama, pemerintah Negara atau raja, penguasa Yudisial dan penguasa ekonomi yang menikmati kekayaan Yehuda. Komposisi bagian kedua yaitu: Mikha 3:1-12 menuliskan bencana Sion dan Yerusalem menjadi tumpukan puing-puing dan 4:1-5:14 keselamatan Ziarah bangsa-bangsa ke Sion. Nabi Mikha merupakan nabi yang pertama yang menyampaikan akan kehancuran Yerusalem dan Bait Allah³⁶ (Mikha 3:12). Tindakan Nabi Mikha ini merupakan tindakan yang memprotes kepercayaan akan kultus yang palsu. Komposisi ketiga menuliskan mengenai berita Mikha 6:1-7:7 mengenai proklamasi bencana terhadap Yerusalem dan pasal 7:8-20 yang menuliskan mengenai keselamatan bagi Yerusalem. Setelah penulisan komposisi Mikha 1-5 kumpulan teks diperluas dengan Mikha 6:1-7:7 yang menurut Wolff teks ini dari kelompok pedagang lain pada zaman Persia awal yang menerapkan kritik sosial pada zaman Mikha dan zaman itu sendiri. Hubungan editor dalam Mikha 6:1 menghubungkan masalah ini dengan pasal 5:14. Gabungan dari dua kumpulan membuktikan situasi yang diungkapkan dalam nubuat ini, memperkuat argumen Wolff bahwa dua kelompok perdagangan yang berbeda pada era Persia awal ternyata berhubungan.

¹⁴ Ibid, 6.

¹⁵ Jhon Bright, A History of Israel: Old Testament Library, (Bloomsbury Street London, Westminster Press: 1967), 260

Akhirnya, kelompok yang bertanggung jawab atas tradisi Mikha 1-5 menyesuaikan dengan Kitab Mikha pada periode setelah pembuangan untuk digunakan dalam liturgi dengan menambahkan tiga mazmur dalam 7:8-10, 14-17, 18-20 yang berfungsi sebagai reaksi komunitas untuk membaca suara kenabian kuno dan yang baru atau yang sekarang.

Pesan Teologi Kitab Mikha

Pesan teologi Kitab Mikha berdasarkan komposisi kitanya dapat dituliskan sebagai berikut: Pertama, menempatkan Allah dalam posisi utama dengan menghadirkan otoritas-Nya dalam kehidupan manusia; Kedua, menjaga kekudusan dan hubungan yang baik dengan Allah dalam praktik kehidupan umat; Ketiga, kehadiran Allah di tengah umat dapat terus terpelihara apabila mereka bertekun, memelihara, menuntut dan melakukan segala perintah-Nya dalam ketaatan; Keempat, kesejahteraan, keadilan kedamaian dan kebahagiaan dialami umat melalui otoritas ilahi Allah yang hadir di tengah kehidupan yang diresponi dengan praktik kultus. Hal ini dilakukan melalui ketekunan memelihara dan melaksanakan perintah Allah. Hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintah Allah membuahkan kehidupan yang sejahtera, damai dan bahagia; Kelima, tindakan Allah sebagai sarana untuk mengingatkan kesalahankesalahan pemimpin umat melalui penghukuman dan berita pengharapan keselamatan; Keenam, penegakan keadilan sosial dalam masyarakat, bukan banyaknya nubuat yang disampaikan. Kesejahteraan pemimpin dalam masyarakat juga dipengaruhi oleh kesejahteraan umat.

D. Implementasi Pendidikan Menanamkan dan Menumbuhkan Karakter Anti Korupsi Menurut Kitab Mikha Pada Peserta Didik SMK S HKBP Pangururan

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah saat ini masih jauh dari harapan. Siswa masih banyak ditemui terlambat datang ke sekolah, mencontek ketika melaksanakan ujian dan menyelesaikan tugas rumah dari guru. Siswa tanpa sadar telah menunjukkan perilaku korupsi. Guru sebagai suri tauladan juga masih menunjukkan perilaku korupsi karena guru juga terlambat dalam melaksanakan pembelajaran. Ironisnya adalah ketika siswa terlambat datang ke sekolah, maka siswa diberi hukuman sampai jam pembelajaran berakhir, sedangkan ketika guru yang terlambat datang ke sekolah tidak mendapatkan hukuman dari sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi pendidikan anti korupsi belum menyentuh tahap Moral action. Guru belum mampu menjadi panutan bagi siswa dalam menerapkan karakter perilaku anti korupsi. Sasaran utama pendidikan anti korupsi adalah tumbuhnya budaya integritas di kalangan. Semua warga sekolah, sehingga semua warga sekolah memiliki kesadaran yang

tinggi untuk selalu bersikap jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, mandiri, adil, berani, dan peduli terhadap penegakan aturan yang berlaku (Widyastomo, 2013,45).¹⁶ Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari membangun karakter siswa yang seharusnya mampu meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Korupsi merupakan salah satu permasalahan besar dalam kehidupan sosial yang merusak keadilan, kesejahteraan, dan moralitas masyarakat. Dalam konteks keagamaan, kitab suci menjadi salah satu sumber nilai yang dapat digunakan untuk membangun karakter anti korupsi. Salah satu kitab dalam Alkitab yang menyoroti ketidakadilan dan penyimpangan moral adalah Kitab Mikha. Kitab ini berisi kritik terhadap praktik korupsi yang dilakukan oleh pemimpin dan masyarakat Yehuda serta menyerukan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, pendidikan anti korupsi dapat diimplementasikan melalui pemahaman mendalam terhadap pesan dalam Kitab Mikha.

Implementasi Pendidikan dalam Menanamkan dan Menumbuhkan Anti Korupsi Agar pesan Kitab Mikha dapat diterapkan dalam pendidikan anti korupsi, diperlukan strategi yang tepat. Implementasi ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan berikut:

1. Integrasi dalam Kurikulum Pendidikan
Nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan dalam Kitab Mikha dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Pendidikan Pancasila. Siswa diajak untuk menganalisis teks Kitab Mikha dan menghubungkannya dengan realitas sosial saat ini.
2. Pendekatan Keteladanan
Guru dan pemimpin pendidikan harus menjadi teladan dalam bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Memberikan contoh tokoh-tokoh dalam sejarah yang menolak praktik korupsi dan berjuang demi keadilan.
3. Metode Pembelajaran Berbasis Studi Kasus
Siswa diajak untuk mendiskusikan kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan menghubungkannya dengan pesan dalam Kitab Mikha. Melalui studi kasus, siswa dapat mengembangkan pemahaman kritis tentang dampak korupsi dan pentingnya kejujuran.
4. Pelibatan dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan
Program seperti aksi sosial, seminar anti korupsi, dan diskusi kelompok dalam

¹⁶ Widyastomo, Membangun Karakter Siswa Melalui Penegakan Nilai-nilai Sekolah, 2013, 45.

komunitas gereja dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan nyata. Melalui khotbah dan pengajaran di gereja, umat Kristen dapat lebih memahami pentingnya hidup dalam kejujuran dan keadilan.

5. Pembentukan Karakter melalui Pendidikan Moral
Pendidikan anti korupsi tidak hanya dilakukan melalui teori, tetapi juga melalui pembiasaan sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab harus ditanamkan sejak dini baik dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat.

Implementasi pendidikan anti korupsi memiliki unsur pelaksanaan dengan integritas mata pelajaran. Muatan pembelajaran yang berhubungan dengan implementasi anti korupsi dengan tujuan pembelajaran siswa mampu menjelaskan upaya pemberantasan korupsi dan paham dengan nilai-nilai anti korupsi, (Asyafiq, 2017).¹⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan nilai-nilai untuk membangun perilaku anti korupsi, yang terjadi akibat tidak konsisten pada nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, konsumtif yang menjadikan sikap dan perilaku hanya dengan jalan pintas, KPK mengembangkan nilai-nilai anti korupsi, (KPK, 2008). Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar masih jauh dari yang diharapkan, masih banyak sekali siswa yang tidak disiplin dengan aturan sekolah dengan datang ke sekolah terlambat, mencontek ketika proses pembelajaran atau ujian, yang tanpa mereka sadari hal tersebut telah menunjukkan sikap korupsi. Sehingga perlu kesadaran dari semua warga sekolah agar dapat menjadikan hal tersebut sebagai perubahan terhadap siswa yang masih belum mencerminkan anti korupsi, warga sekolah mengimplementasikan sikap jujur, tanggung jawab, kerja sama, adil, berani dan peduli dengan aturan yang berlaku, (Widyastomo, 2013).¹⁸

Implementasi pendidikan anti korupsi di sekolah dasar yang masih jauh dari yang diharapkan karena karakter yang ditanamkan belum sampai kepada siswa. Ada beberapa cara yang bisa ditanamkan dalam perilaku anti korupsi, 1) Menanamkan nilai kejujuran dengan membiasakan siswa tidak mengambil milik orang lain, menghargai nilai ujian yang mereka dapat dengan hasil usahanya dalam mengerjakan tidak dengan mencontek, 2) Menanamkan sikap kesederhanaan, dengan cara bersyukur dengan apa yang sudah dimiliki, 3) Menanamkan perilaku untuk dapat menghadapi masalah, dengan cara tidak merugikan dan menyakiti orang lain, 4) Memiliki rasa tanggung jawab dengan apapun yang sudah dilakukan, 6) Menanamkan

¹⁷ Asyafiq, Edukasi Anti Korupsi Untuk Generasi Muda, 2017, 32.

¹⁸ Wisyastomo, 2013

perilaku disiplin, dengan menghargai waktu, 7) Menanamkan perilaku keadilan dengan mengajarkan untuk bisa berbagi kepada sesama temannya, 8) Menumbuhkan rasa kepedulian dengan rasa empati kepada orang lain, 9) Menanamkan perilaku kerja sama, agar apapun yang dilakukan secara bersama dapat diselesaikan sesuai tujuannya. Nilai integritas ini ditanamkan sejak dini, untuk membangun karakter perilaku anti korupsi dan mencegah tindak korupsi di masa yang akan datang, (Agus & Delian, 2015).¹⁹

Ada beberapa bentuk korupsi yang kerap terjadi di SMK S HKBP PANGURURAN mencerminkan nilai yang tidak jujur dan melanggar etika sebagai berikut :

1. Memakan Uang Sekolah

Berikut adalah solusi yang bisa dilakukan dalam menangani kasus tersebut adalah :

1. Pendekatan edukatif dan konseling.²⁰
2. Integrasi pendidikan karakter dan spiritualitas.
3. Pengampunan dan pembinaan karakter.²¹
4. Melibatkan orang tua dalam proses pembinaan²²

2. Cabut Saat Kegiatan KPBM Berlangsung

Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah :

1. Menanamkan nilai keadilan dan tanggung jawab²³
2. Membangun komunitas sekolah yang adil dan peduli
3. Mengedepankan kasih dan kesetiaan sebagai dasar pendidikan
4. Memberikan teladan dan bimbingan moral dari pihak sekolah

3. Mencontek Saat Ujian Berlangsung

Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah:

1. Mendorong kasih setia dan empati.
2. Membina kerendahan hati di hadapan Tuhan
3. Pendidikan karakter berbasis keadilan

KESIMPULAN

¹⁹ Agus dan Delian, 2015

²⁰ Doni Koesoema, *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Jakarta: Grasindo, 2007.

²¹ Mikha 7:18-19, Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), 2002.

²² Mikha 6:8, Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), 2002

Pendidikan memiliki peran penting dalam menanamkan dan menumbuhkan karakter yang positif. Salah satu karakter yang harus ditanamkan sejak dini adalah anti korupsi. Pendidikan yang efektif dapat membentuk generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki integritas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Korupsi adalah salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam perspektif agama, khususnya dalam Kitab Mikha, terdapat pesan moral yang relevan untuk membangun karakter anti korupsi. Kitab Mikha menyoroti keadilan, kejujuran, dan penolakan terhadap penindasan serta kecurangan. Pesan ini relevan dalam upaya membentuk karakter yang menolak segala bentuk korupsi.

Implementasi pendidikan yang menanamkan nilai-nilai anti korupsi berdasarkan ajaran Kitab Mikha dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Pertama, pengenalan nilai kejujuran dan keadilan dalam materi pembelajaran di sekolah. Kedua, penerapan teladan oleh pendidik yang menunjukkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, pembiasaan perilaku yang mendukung integritas, seperti sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas dan menghargai hasil kerja orang lain.

Dengan memadukan nilai-nilai moral yang terdapat dalam Kitab Mikha dengan pendekatan pendidikan yang efektif, diharapkan generasi mendatang mampu menjadi agen perubahan yang menolak dan melawan segala bentuk korupsi. Pendidikan yang berlandaskan pada karakter anti korupsi akan menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyafiq, S. 2017. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran Ppkn Berbasis Project Citizen Di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Civics*. Volume 14, No.2
- Eko, Handoyono. (2013). Pendidikan Anti Korupsi. (Anggota Ikapi). Yogyakarta. Penerbitan Ombak 2013. Hal 18-23. 32-34.
- Eko, Handoyono. (2013). Pendidikan Anti Korupsi. (Anggota Ikapi). Yogyakarta. Penerbitan Ombak 2013. Hal 18-23. 32-34
- Jhon Bright, A History Of Israel: Old Testament Library, (Bloomsbury Street London, Westminster Press: 1967), 260.
- John Sewey, Democracy And Education, 1916.
- Johnson, Michael. 2005. Sindrom Korupsi: Kekayaan, Kekuasaan, Dan Demokrasi. Cambridge: Pers Universitas Cambridge.
- Johnson, Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan Pribadi, 2005, 12

- Johnson, Korupsi: Penyalahgunaan Kekuasaan Untuk Kepentingan Pribadi, 2005, 16.
- Koesoema Doni, Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak Di Zaman Global, Jakarta: Grasindo, 2007.
- Kpk, Buku Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, 2007, 2.
- Lili, Dkk. Keadilan, Penghukuman, Pengharapan: Kontribusi Teologis Kitab Mikha Bagi Umat. Jurnal Teologi Gracia Deo. 80-87.
- Maheka, Arya. T.Th. Mengenali Dan Memberantas Korupsi. Jakarta: Kpk Ri.
- Mikha 6:8, Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia (Lai), 2002
- Mikha 7:18-19, Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia (Lai), 2002.
- Mislywicz, Mesir Kuno Dan Intrik Kekuasaan: Politik, Korupsi Dan Kejatuhan, 200, 17.
- Nopan Omeri. Pentingnya Pendidikan Karakter Dalam Dunia Pendidikan. Nitro Pdf Profesional. 465-466.
- Pope, Strategi Efektif Dalam Pemberantasan Korupsi, 2007, 3.
- Pusat Bahasa Depdiknas, 2005, 596-597.
- Siregar Ahmad Ansyari, Dkk. Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. Jurnal Pendidikan Sosial. 2022.
- Sitepu, Dinamika Korupsi Dan Strategi Pemberantasannya, 2004, 1.
- Sudarminto, T. (2018). Pendidikan Anti Korupsi: Perspektif Agama Dan Moral. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, A. (2021). Membangun Generasi Berintegritas: Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Kristen. Surabaya: Gloria.
- Widyastono, H. 2013. Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Sekolah. Jurnal Teknodik, Volume 17, No.2.